

BAB I

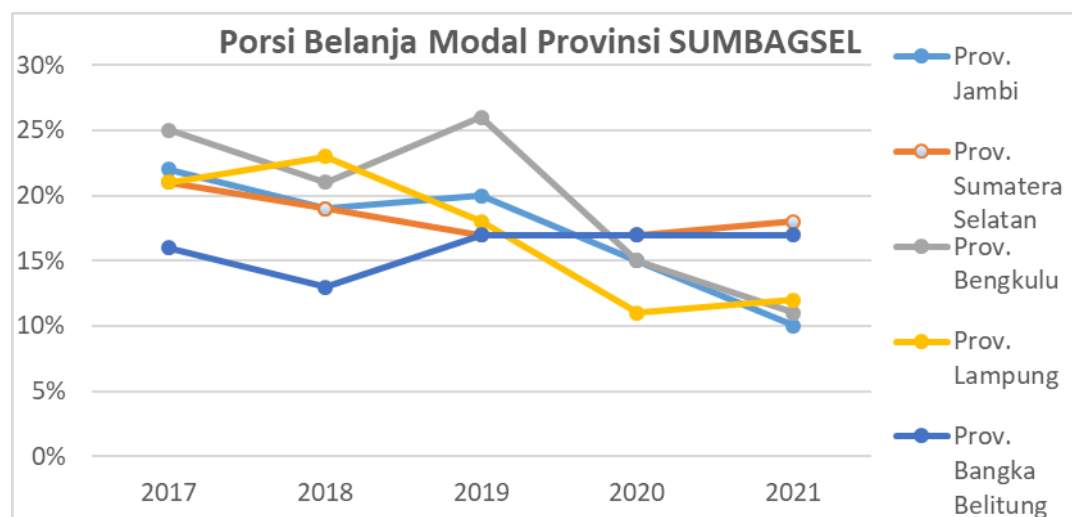
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Reformasi di Indonesia yang mengakhiri era Orde Baru pada akhir 1990-an, berdampak besar pada pengelolaan keuangan publik yaitu salah satunya menghasilkan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri pertama kali dilaksanakan melalui ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga kini mengalami banyak perubahan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dianggap dapat lebih mengetahui kebutuhan daerahnya sendiri dibandingkan dengan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan di wilayahnya secara cepat dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, otonomi daerah menjadikan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam hal pendanaan sendiri atas wilayahnya sehingga pemerintah daerah diberikan hak untuk mengeksplorasi potensi sumber pendanaan secara mandiri memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sehingga pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan kondisi keuangan dengan meningkatkan produktivitas melalui penggunaan sumber daya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada penduduk di wilayah mereka sendiri. Kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari kondisi keuangannya yang berkelanjutan, sehingga tidak menambah beban kepada masyarakat pada masa mendatang. Keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) terkait erat dengan kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara berkelanjutan (Dollery, 2009). Dimana *Financial*

Sustainability pada sektor pemerintah merupakan kemampuan pemerintah untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik secara kuantitas dan kualitas pada saat ini dan untuk masa depan (Bisogno dkk., 2017). Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah wajib mengeluarkan dana yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, yaitu pengeluaran yang berkaitan dengan pelayanan seperti infrastruktur dan pemeliharannya. Jenis belanja yang terkait dengan belanja yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas masyarakat adalah Belanja Modal. Sehingga, keberlangsungan pelayanan publik terkait erat dengan belanja modal. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 102 Tahun 2018, belanja modal digunakan untuk membeli aset tetap atau aset lain yang bermanfaat untuk beberapa periode akuntansi. Aset tersebut digunakan untuk kegiatan masyarakat dan unit kerja terkait. Semakin tinggi belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memberikan kesinambungan pelayanan dengan membangun sarana atau prasarana bagi masyarakat. Di Provinsi Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL) mengalami kenaikan dan penurunan pada porsi Belanja Modal tahun anggaran 2017-2021 seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan (Data Diolah, 2023)

Gambar 1.1
Porsi Belanja Modal Provinsi SUMBAGSEL

Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017-2021 yang terlihat pada Gambar 3.1, dapat diketahui bahwa porsi belanja modal pada pemerintah daerah Provinsi SUMBAGSEL yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung mengalami kenaikan dan penurunan dalam lima tahun terakhir (2017-2021) seperti porsi Belanja Modal pada Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017-2018 sebesar 4% (25%-21%), tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 5% (21%-26%), mengalami penurunan drastis pada tahun 2019-2020 sebesar 11% (26%-15%) dan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan juga sebesar 4% (15%-11%). Adapun porsi Belanja Modal pada Provinsi Lampung mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 sebesar 2% (21%-23%), pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 5% (23%-18%), pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan juga sebesar 7% (18%-11%) dan pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 1% (11%-12%). Porsi belanja modal pemerintah daerah Provinsi SUMBAGSEL yang rata-rata banyak mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan pada tahun tersebut Indonesia mengalami pandemi penyakit *coronavirus* 2019 (Covid-19) yang telah berlangsung di seluruh dunia. Tepatnya pada 2 Maret 2020, dua orang dipastikan tertular oleh warga negara Jepang. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus* 2 (*SARS-CoV-2*). Sejak 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi, di mana DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah di Indonesia adalah yang paling rentan terhadap *SARS-CoV-2* (Wikipedia, 2022).

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, perekonomian dan daya beli masyarakat dimana untuk menanganinya pemerintah merancang Program Pemulihan Sosial Ekonomi (PEN) yang menerapkan *refocusing* dan realokasi anggaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pengamanan Daya Beli Masyarakat serta Perekonomian Nasional (SKB 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020) memuat tata cara *refocusing* dan realokasi

dana anggaran ke pemerintah daerah: Penyesuaian target penerimaan daerah APBD meliputi menyesuaikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perbendaharaan dan keuangan dan menyesuaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan kemungkinan pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi. dan daerah/kota, serta asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2020, yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah akibat penurunan kegiatan ekonomi. Terkait dengan belanja daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah, antara lain rasionalisasi belanja pegawai, khususnya penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, pengelolaan/pengurangan biaya kegiatan/biaya kasir BOS, dan/atau pengaturan/pengurangan Lembur. gaji mengingat kebutuhan nyata pelaksanaan pekerjaan secara mendesak dan selektif. Demikian pula, belanja modal dilakukan rasionalisasi sekurang-kurangnya 50% melalui pemotongan anggaran, terutama untuk pembelian kendaraan perusahaan/komersial, pembelian mesin dan alat berat dan/atau untuk melakukan kemungkinan perluasan infrastruktur lainnya terbawa ke tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan banyak pekerjaan dan program pembangunan yang tertunda atau tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga peningkatan pelayanan publik menjadi kurang optimal dan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah kota dalam menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sedangkan, menurut IFAC (2012) pemerintah daerah yang berkelanjutan secara ekonomi adalah pemerintah daerah yang dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian layanan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) sehingga mereka dapat mengembangkan keputusan yang baik dan tepat untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Navarro-Galera, Muñoz, Subirez, dan Bolivar (2019), daerah yang memiliki lebih banyak sumber pendapatan eksternal daripada internal dapat menghadirkan risiko yang menghambat *Financial*

Sustainability, sehingga kemandirian keuangan yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong dalam mencapai *Financial Sustainability*. Pada saat yang sama, pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, terutama dengan meminimalkan pengeluaran yang tidak terkait dengan pelayanan publik, dapat memunculkan faktor untuk mendorong adanya *Financial Sustainability*. Pemerintah daerah dengan biaya administrasi yang tidak efisien atau tinggi dapat mengurangi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah pada masyarakat (Jin & Zhang, 2011). Winarna, Widagdo & Setiawan (2017) menemukan bahwa faktor yang mempersulitkan pemerintah daerah lebih besar ketika pemerintah daerah mempunyai utang yang banyak. Dimana hasil dari keuangan pemerintah daerah mengacu pada layanan publik, terlepas dari aktivitas pendanaan/profitabilitas bukanlah tujuan utama pemerintah, tetapi dengan adanya surplus pemerintah daerah dapat dengan wajar membiayai investasi pendanaan modal pemerintah (Cohen dkk., 2007).

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti topik serupa dimana penelitian *Financial Sustainability* banyak dilakukan pada sektor bisnis seperti perbankan. Pada sektor pemerintah penelitian mengenai *Financial Sustainability* masih sedikit dan kebanyakan di negara-negara Eropa, Australia dan Amerika. Slembeck, Jans & Leu (2014) menganalisis mengenai *Financial Sustainability* yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk membatasi utang pemerintah yang berlebihan dan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang dan berkelanjutan. Brusca, Rossi & Aversano (2015) melakukan penelitian yang membandingkan kondisi ekonomi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong keberlanjutan ekonomi antara Italia dan Spanyol. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu, seperti Kadafi & Amirudin (2020) meneliti *Financial Sustainability* dan *Financial Performance* pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan memetakan kinerja keuangan dengan menggunakan metode Quadrant sedangkan pada penelitian ini secara khusus meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Sustainability* dari segi keuangan dengan menggunakan Variabel Independen (Variabel Bebas) meliputi Kemandirian Keuangan (X_1), Efisiensi Keuangan (X_2), Utang Daerah

(X_3), dan Kinerja Keuangan (X_4). Sedangkan, Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah *Financial Sustainability* (Y). Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa variabel ini menunjukkan adanya perbedaan pada hasil penelitian atau berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*. Jadi, penulis menggunakan kembali variabel tersebut sebagai penelitian lanjutan atas penelitian terdahulu dengan objek dan tahun yang berbeda yaitu di 60 Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL dengan rincian 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, 10 Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan 7 Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019-2021. Hal ini juga sesuai dengan saran dari penelitian terdahulu. Penelitian ini mempertimbangkan masih sedikitnya penelitian mengenai *Financial Sustainability* pada pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financial Sustainability* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability* Pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh Efisiensi Keuangan terhadap *Financial Sustainability* Pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh Utang Daerah terhadap terhadap *Financial Sustainability* Pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan?
4. Apakah terdapat pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* Pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan?
5. Apakah terdapat pengaruh Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan, Utang Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* Pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan penentuan rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar dalam penyusunan dan penulisan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas dan lebih jelas arah pembahasannya mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Financial Sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Data yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019-2021 di 60 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Bagian Selatan dengan rincian 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, 10 Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan 7 Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan pada rumusan masalah yang penulis buat sebelumnya, adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Efisiensi Keuangan terhadap terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Utang Daerah terhadap terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan, Utang Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi penyumbang pikiran bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi bahan pembacaan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait bidang akuntansi sektor publik.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran informasi mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Financial Sustainability* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan yang diharapkan dapat menyumbangkan saran dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis mengenai keberlanjutan keuangan pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.